

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2023



Jalan Raya Tlanakan Pamekasan
Pamekasan - Jawa Timur 69371



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Raya Tlanakan Pamekasan

Telp. 0324322458 Fax. 0324327428

Pamekasan - Jawa Timur 69371

Website : pa-pamekasan.go.id

e-mail : pa_pmk126@yahoo.com/pa.pmk126@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester I Tahun 2023. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Pamekasan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Pamekasan. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Pamekasan, 30 Juni 2023
Sekretaris

AKHMADI, S.H.

NIP. 197006091991031001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	xi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xiii
NERACA	xiv
LAPORAN OPERASIONAL	xv
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xvi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1 Dasar Hukum	1
A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pamekasan.....	2
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	4
A.4 Basis Akuntansi	4
A.5 Dasar Pengukuran.....	4
A.6 Kebijakan Akuntansi.....	5
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	11
B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	11
B.2 Belanja Pegawai	13
B.3 Belanja Barang.....	14
B.4 Belanja Modal.....	14
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15
B.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	15
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran.....	18
C.2 Persediaan	18
C.3 Tanah.....	20
C.4 Peralatan dan Mesin.....	20
C.5 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	21
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester I Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.	21

C.6 Gedung dan Bangunan.....	21
C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan	21
Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester I Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan.....	21
C.8 Aset Tetap Lainnya	21
C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	21
C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	22
C.16 Aset Tak Berwujud	23
C.17 Aset Lain–Lain.....	24
C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	24
C.14 Uang Muka dari KPPN	25
C.15 Ekuitas	25
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	26
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	26
D.2 Beban Pegawai	26
D.3 Beban Persediaan	26
D.4 Beban Barang dan Jasa.....	26
D.5 Beban Pemeliharaan	27
D.6 Beban Perjalanan Dinas.....	27
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	27
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	27
D.9 Kegiatan Non Operasional.....	27
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	28
E.1 Ekuitas Awal.....	28
E.2 Surplus (Defisit) LO	28
E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	28
E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset	28
E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan	28
E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap	29
E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.....	29
E.3.6 Koreksi Lain-lain	29
E.4 Transaksi Antar Entitas.....	29
E.5 Ekuitas Akhir	29
F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	30
F.2 Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	30

F.3 Rekening Pemerintah.....	30
F.4 Pengungkapan Penting Lain-lain.....	30

DAFTAR TABEL

Hal

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja</i>	<i>122</i>
<i>Tabel 3. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 4. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 5. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang.....</i>	<i>144</i>
<i>Tabel 6. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....</i>	<i>155</i>
<i>Tabel 8. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 9. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Akun</i>	<i>177</i>
<i>Tabel 10. Perbandingan Rincian Persediaan Per Akun</i>	<i>188</i>
<i>Tabel 11. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Akun.....</i>	<i>.19</i>
<i>Tabel 12. Perbandingan Aset Tetap antara Neraca SAIBA dan SIMAKBMN</i>	<i>200</i>
<i>Tabel 13. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	<i>222</i>
<i>Tabel 14. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Akun</i>	<i>233</i>
<i>Tabel 15. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Akun.....</i>	<i>255</i>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per Juni Tahun 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pamekasan, 30 Juni 2023
Kepala Unit Akuntansi Pembantu Anggaran
Sekretaris Pengadilan Agama Pamekasan



AKHMADI, S.H.

NIP. 197006091991031001

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan Semester I Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan Realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan Juni Tahun 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 389.764,00 atau mencapai 108 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 360.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.671.868.941,00 atau mencapai 54 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.906.834.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada Semester I Tahun 2023.

Nilai Aset per Semester I Tahun 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 5.627.747.952,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 34.307.268,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 5.593.440.684,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 320.219.148,00 dan Rp 5.307.528.804,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp 519.472,00, sedangkan jumlah Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp 3.082.272.548,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 3.081.753.076,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 160,00 dan Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp 3.081.752.916,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp 5.608.952.543,00, ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp 3.081.752.916,00), kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai tahun berjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan dan transaksi antar entitas masing-masing senilai Rp 0,00, dan Rp 2.780.329.177,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal Semester I Tahun 2023 adalah senilai Rp 5.307.528.804,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal Semester I Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan Basis Kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan Basis Akrua.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SEMESTER I TAHUN 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catata	TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	360.000	389.764	108	0
Jumlah Pendapatan		360.000	389.764	108	0
Belanja					
Belanja Pegawai	B.2	3.328.557.000	1.888.767.237	57	1.611.871.299
Belanja Barang	B.3	1.578.277.000	783.101.704	50	784.221.777
Belanja Modal	B.4	0	0	0	23.500.000
Jumlah Belanja		4.906.834.000	2.671.868.941	54	2.419.593.076

NERACA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN NERACA PER SEMESTER I TAHUN 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	30.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (Preparid)	C. 2.	0	206.055
Piutang Bukan pajak	C. 3.	129.868	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (Netto)	C. 4.	129.868	0
Persediaan	C. 5.	4.177.400	103.800
Jumlah Aset Lancar		34.307.268	309.855
Aset Tetap			
Tanah	C. 6.	2.447.769.000	2.447.769.000
Peralatan dan Mesin	C. 7.	2.270.643.734	2.146.243.734
Gedung dan Bangunan	C. 8.	3.595.930.000	3.595.930.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 9.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.10.	5.704.857	5.704.857
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.11.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.12.	(2.726.606.907)	(2.567.018.891)
Jumlah Aset Tetap		5.593.440.684	5.628.628.700
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.13.	22.200.000	22.200.000
Akumulasi Penyusutan/Amortasi Aset Lainnya	C.14.	(22.200.000)	(22.200.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		5.627.747.952	5.628.938.555
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang untuk pihak ketiga	C.15.	290.219.148	19.986.012
Uang Muka dari KPPN	C.16.	30.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		320.219.148	19.986.012
Jumlah Kewajiban		320.219.148	19.986.012
EKUITAS			
Ekuitas	C.17.	5.307.528.804	5.608.952.543
Jumlah Ekuitas Dana		5.307.528.804	5.608.952.543
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		5.627.747.952	5.628.938.555

LAPORAN OPERASIONAL

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SEMESTER I TAHUN 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan Operasional			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	519.472	0
Jumlah Pendapatan Operasional		519.472	0
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2.101.931.385	2.044.710.463
Beban Persediaan	D. 3	24.213.644	13.849.025
Beban Barang dan Jasa	D. 4	578.394.720	554.634.534
Beban Pemeliharaan	D. 5	205.842.283	232.198.200
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	27.852.500	24.850.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 8	144.038.016	104.364.881
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 9	0	0
Jumlah Beban		3.082.272.548	2.974.607.103
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(3.081.753.076)	(2.974.607.103)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	D. 10	160	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	D. 11	(3.081.752.916)	(2.974.607.103)
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(3.081.752.916)	(2.974.607.103)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SEMESTER I TAHUN 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Ekuitas Awal	E. 1	5.608.952.543	5.556.327.383
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(3.081.752.916)	(2.974.607.103)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E. 2.1		
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	0	0
Koreksi atas Reklasifikasi	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	2.780.329.177	2.419.593.076
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 5	(301.423.739)	(555.014.027)
Ekuitas Akhir		5.307.528.804	5.001.313.356

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 54/PMMK.06/2014;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2017 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya

Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Agama
Pamekasan*

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pamekasan

Rencana Strategis Pengadilan Agama Pamekasan

Visi dan Misi Pengadilan Agama Pamekasan

Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 adalah sebagai berikut :
"*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*".

Penjelasan :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk memperjelas upaya pencapaian Visi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya menurunkan dalam 4 (empat) pilar Misi yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Pamekasan sebagai Visi dan Misinya.

Tujuan

Pengadilan Agama Pamekasan bisa menjadi BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, apabila :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
- e. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- f. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
- g. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengadilan Agama Pamekasan

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2020 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Pamekasan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAKBMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan dan Aset Lainnya untuk diperbandingkan dengan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.4 Basis Akuntansi

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan–LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber Pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan–LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas Pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Persekot Gaji.
 - Pendapatan atas Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber Pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya Kewajiban, terjadinya konsumsi Aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas

kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal Neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan Tahunan 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Semester I Tahun 2023 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :
-

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi Akumulasi Amortisasi.
- Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Realisasi

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan

B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Negara Bukan

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 (Periode Semester I Tahun 2023) adalah sebesar Rp 389.764,00 atau mencapai 108 persen dari Estimasi Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 360.000,00.

Pajak Rp

389.764,00

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Pamekasan per Semester I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*(Dalam Rupiah)*

		Anggaran	Realisasi Pendapatan Bruto	Pengembalian Pendapatan	Realisasi Pendapatan Neto	% Realisasi Anggaran
425122	Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	389.764			389.764	100
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu					
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu					

Realisasi**Belanja**

Belanja

Negara Rp.
2.671.868.941,
00

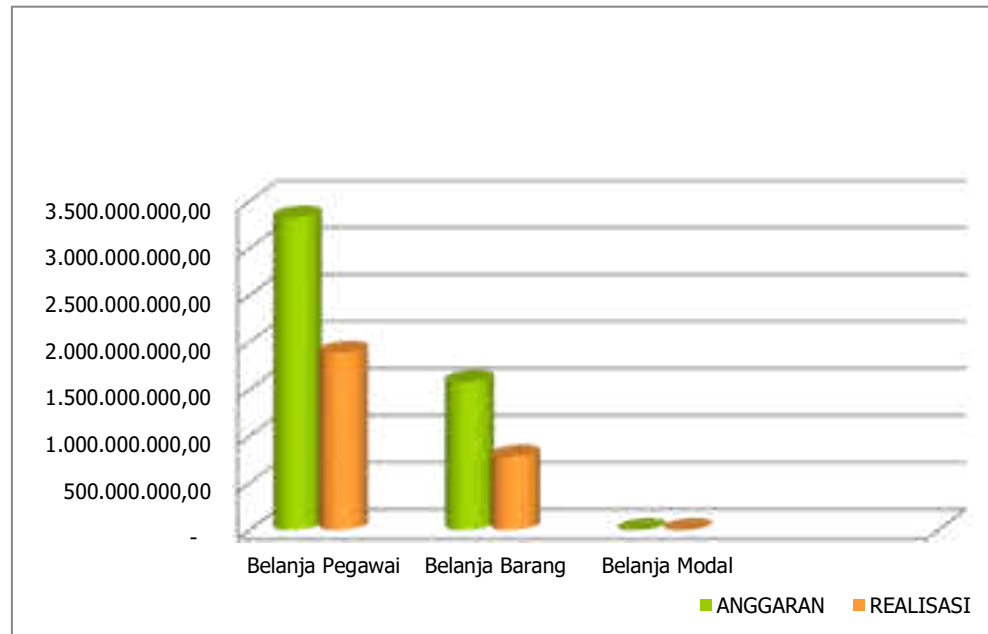
Realisasi Belanja Pengadilan Agama Pamekasan per Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.671.868.941,00 atau 54 persen dari Anggaran Belanja sebesar Rp 4.906.834.000,00.

Rincian Estimasi Belanja dan Realisasi Belanja Pengadilan Agama Pamekasan per Semester I Tahun 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja*(Dalam Rupiah)*

	Anggaran	Realisasi Belanja Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Belanja Neto	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	3.328.557.000	1.888.767.237	0	1.888.767.237	57
Belanja Barang	1.578.277.000	783.101.704	0	783.101.704	50
Belanja Modal	0	0	0	0	0
Jumlah	4.906.834.000	2.671.868.941	0	2.671.868.941	54

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per Semester I Tahun 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi Belanja per Semester I Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 252.272.865,00 atau sebesar 10,43 persen dibandingkan Tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya pagu belanja pegawai yang besar tetapi tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang ada sehingga jumlah realisasi belanja pegawai sedikit lebih kecil daripada tahun lalu.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja per Semester I Tahun 2023 dan Tahunan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1.888.767.237	1.611.971.299	276.795.938	17,17%
Belanja Barang	783.101.704	784.221.777	-1.120.073	-0,14%
Belanja Modal	0	23.500.000	-23.500.000	100,00%
Total Belanja	2.671.868.941	2.419.693.076	252.175.865	10,42%

*Realisasi
Belanja
Pegawai Rp
1.888.767.237
,00*

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per Semester I Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.888.767.237,00 dan Rp 1.611.871.299,00 atau terjadi Kenaikan sebesar Rp 276.895.938,00 atau 17,18 persen. Penurunan dikarenakan adanya pejabat negara dan pegawai yang mutasi keluar ditambah dengan pagu

anggaran besar tetapi jumlah pegawai yang lebih sedikit.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Pegawai per Semester I Tahun 2023 dan Tahunan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1.888.767.325	1.611.971.299	276.896.026	17,18%
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	0	0,00%
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0	0,00%
Total Belanja Brutto	1.888.767.325	1.611.971.299	276.896.026	17,18%
Pengembalian Belanja	88	0	00	0,00%
Total Belanja Netto	1.888.767.237	1.611.971.299	276.895.938	17,18%

Realisasi

B.3 Belanja Barang

Belanja

Barang Rp

783.101.704,0

0

Realisasi Belanja Barang per Semester I Tahun 2023 dan Tahunan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 783.101.704,00 dan Rp 784.221.777,00. Realisasi Belanja Barang per Semester I Tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp 1.120.073,00 atau 0,14 persen dari Realisasi Belanja Barang per Tahunan 2022. Hal ini disebabkan antara lain adanya peningkatan dalam Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Persediaan, Belanja Jasa, dan Belanja Pemeliharaan. Perbandingan rincian Realisasi Belanja Barang per Semester I Tahun 2023 dan Tahunan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2023 Realisasi	TA 2022 Realisasi	Perubahan Rp
Belanja Barang Operasional	503.390.494	466.672.500	36.717.994
Belanja Barang Non Operasional	8.880.000	0	8.880.000
Belanja Jasa	40.408.727	63.012.877	-22.604.150
Belanja Pemeliharaan	202.569.983	229.686.400	-27.116.417
Belanja Perjalanan Dinas	27.852.500	24.850.000	3.002.500
Total Belanja Brutto	783.101.704	784.221.777	-1.120.073
Pengembalian Belanja	0	0	0

Realisasi

B.4 Belanja Modal

Belanja

Modal Rp 0,00

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal per Semester I Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 23.500.000,00.

Realisasi Belanja Modal per Semester I Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 23.500.000,00 atau 100,00 persen dari Realisasi Belanja Modal per Tahun 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan pada Belanja Peralatan dan Mesin, Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal per Semester I Tahun 2023 dan Tahunan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran		Kenaikan/(penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	23.500.000,00	(23.500.000,00)	-100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Bruto	-	23.500.000,00	(23.500.000,00)	-100,00
Pengembalian Belanja	-	-	-	0,00
Realisasi Belanja Netto	-	23.500.000,00	(23.500.000,00)	-100,00

Realisasi

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Semester I Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 23.500.000,00 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Semester I Tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp 23.500.000,00 atau 100,00 persen dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Tahun 2022. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan kebutuhan dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin pembelian lap top untuk hakim.

Modal

Peralatan dan

Mesin Rp 0,00

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Semester I Tahun 2023 dan Tahunan 2022 tersebut antara lain:

Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran		Kenaikan/(penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	23.500.000,00	(23.500.000,00)	-100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	#DIV/0!
Realisasi Belanja Bruto	-	23.500.000,00	(23.500.000,00)	-100,00
Pengembalian Belanja	-	-	-	0,00
Realisasi Belanja Netto	-	23.500.000,00	(23.500.000,00)	-100,00

Realisasi

B.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Semester I Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja

Belanja

Modal Gedung

Modal Gedung dan Bangunan Semester I Tahun 2023 tidak mengalami kenaikan

dan Bangunan dan penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Tahun 2022.

Rp 0,00

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Semester I Tahun 2023 dan Tahun 2022 tersebut antara lain:

Tabel 8. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran		Kenaikan/(penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	0,00
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	-	0,00
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup Kas dan Setara Kas yang diharapkan untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 34.307.268,00 dan Rp 309.855,00, terjadi Kenaikan sebesar Rp 98.299.812,00 atau 10,972.04 persen.

Perbandingan rincian saldo Aset Lancar per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini :

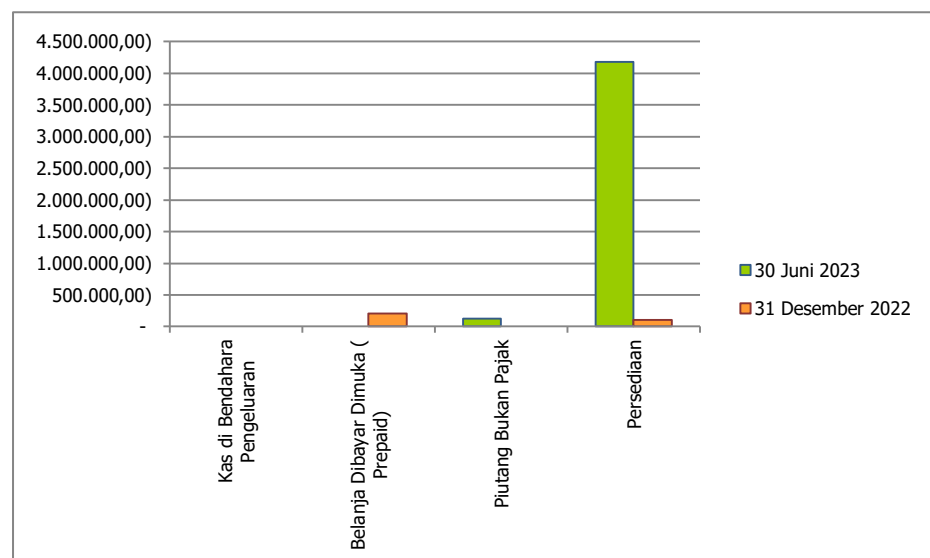
Tabel 9. Perbandingan Rincian Aset Lancar Per Akun

Uraian	TA 2023	TA 2022	(Dalam Rupiah) Kenaikan/Penurunan
Kas di Bendahara Pengeluaran	30.000.000	0	30.000.000
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	0	206.055	(206.055)
Piutang Bukan Pajak	129.868	0	129.868
Persediaan	4.177.400	103.800	4.073600
Total Aset Lancar	34.307.268	309.855	33.997.413

Komposisi Aset Lancar per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dalam grafik dibawah ini :

Grafik

Komposisi Aset Lancar



Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 30.000.000,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Pamekasan per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 30.000.000,00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 30.000.000,00 atau 100,00 persen karena adanya uang persediaan yang menjadi kas di tahun anggaran 2023.

Persediaan Rp 4.177.400,00

C.2 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4.177.400,00 dan Rp 103.800,00 terjadi Kenaikan sebesar Rp 4.073.600,00 atau 3,924.47 persen.

Perbandingan rincian saldo Persediaan per Semester I Tahun 2023 dan Tahunan 2022 per akun adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Perbandingan Rincian Persediaan Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Kode Perkiraan	Uraian	30 Juni 2023	31 Desember 2023
1	117111	Barang Konsumsi	4.177.400	103.800
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
3	117911	Persediaan yang belum diregister	0	0
		Jumlah	4.177.400	103.800

Aset Tetap Rp 5.593.440.684,00

Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 5.593.440.684,00 dan Rp 5.628.628.700,00, terjadi Penurunan sebesar Rp 35.188.016,00 atau 0,63 persen.

Perbandingan rincian saldo Aset Tetap per Semester I Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini :

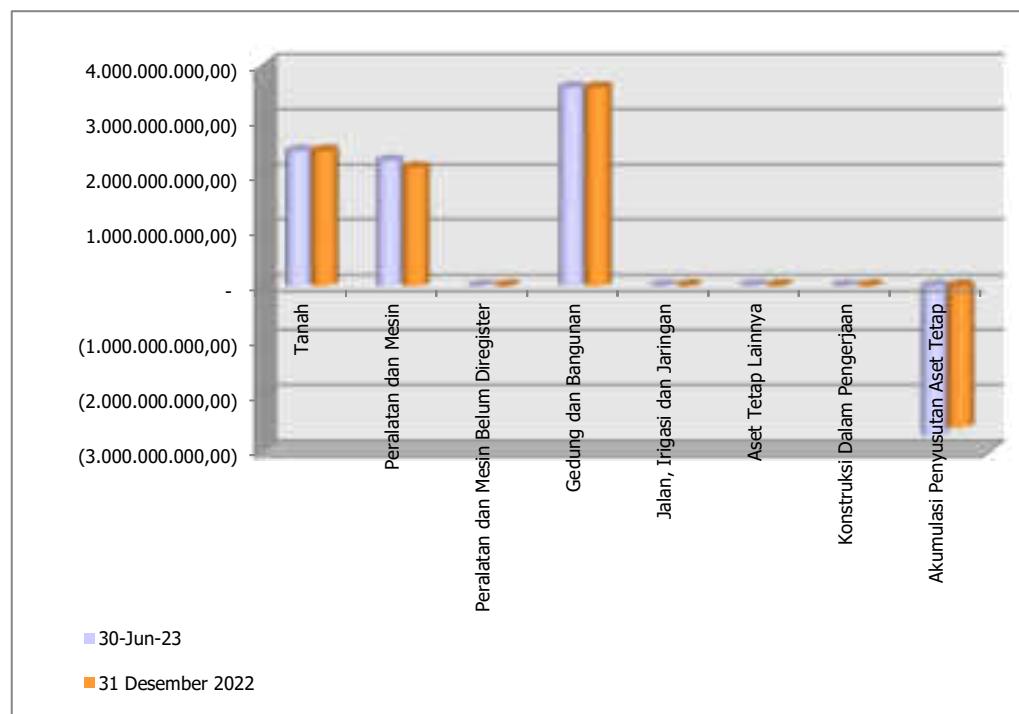
Tabel 11. Perbandingan Rincian Aset Tetap Per Akun

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	30-Jun-23	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan
1	Tanah	2.447.769.000,00	2.447.769.000,00	-
2	Peralatan dan Mesin	2.270.643.734,00	2.146.243.734,00	124.400.000,00
3	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-	-
4	Gedung dan Bangunan	3.595.930.000,00	3.595.930.000,00	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	5.704.857,00	5.704.857,00	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	Jumlah	8.320.047.591,00	8.195.647.591,00	124.400.000,00
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.726.606.907,00)	(2.567.018.891,00)	(159.588.016,00)
	Jumlah Aset Tetap	5.593.440.684,00	5.628.628.700,00	(35.188.016,00)

Komposisi Aset Tetap per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dalam grafik dibawah ini :

Grafik
Komposisi Aset Tetap



Posisi Aset Tetap pada Neraca dibandingkan dengan posisi Aset Tetap pada SIMAKBMN per Semester I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12. Perbandingan Aset Tetap antara Neraca SAIBA dan SIMAKBMN

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca SAIBA	Aset Tetap dalam Neraca SIMAKBMN	Selisih
1	Tanah	2.447.769.000,00	2.447.769.000,00	-
2	Peralatan dan Mesin	2.270.643.734,00	2.270.643.734,00	-
3	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-	-
4	Gedung dan Bangunan	3.595.930.000,00	3.595.930.000,00	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	5.704.857,00	5.704.857,00	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	Jumlah	8.320.047.591,00	8.320.047.591,00	-
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.726.606.907,00)	(2.726.606.907,00)	-
	Jumlah Aset Tetap	5.593.440.684,00	5.593.440.684,00	-

Tanah Rp
2.447.769.000,
00

C.3 Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Mahkamah Agung Republik Indonesia di Wilayah Jawa Timur per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.447.769.000,00 dan Rp 2.447.769.000,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan pada aset tanah.

Mutasi transaksi Tanah pada Tahunan Semester I Tahun 2023 tersebut dapat dijelaskan dan telah disajikan pada CalBMN

Peralatan dan
Mesin Rp
2.270.643.734,
00

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.270.643.734,00 dan Rp 2.146.243.734,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 124.400.000,00 atau 5,80 persen. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester I Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan in.

Peralatan dan Mesin Belum Diregister Rp0,00 **C.5 Peralatan dan Mesin Belum Diregister**
Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Belum Diregister per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0 persen, terdapat pada :

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester I Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Rp 3.595.930.000,00 **C.6 Gedung dan Bangunan**
Saldo Gedung dan Bangunan per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 3.595.930.000,00 dan Rp 3.595.930.000,00, tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan Aset tetap Gedung dan Bnagunan di tahun ini.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester I Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0,00 **C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan**
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,00 dan Rp0,00, tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester I Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan

Aset Tetap Lainnya Rp 5.704.857,00 **C.8 Aset Tetap Lainnya**
Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 5.704.857,00 dan Rp 5.704.857,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

Rincian Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester I Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0,00 **C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak terjadi kenaikan dan penurunan.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada Lampiran A2 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp
2.726.606.907
,00

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.726.606.907,00 dan Rp 2.567.018.891,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 159.588.016,00 atau 6,22 persen.

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Semester I Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 13. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.270.643.734,00	1.939.476.802,00	331.166.932,00
2	Gedung dan Bangunan	3.595.930.000,00	787.130.105,00	2.808.799.895,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah	5.866.573.734,00	2.726.606.907,00	3.139.966.827,00

Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya
Rp 0,00

Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap, termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.

Saldo Aset Lainnya per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

Perbandingan rincian saldo Aset Lainnya per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 14. Perbandingan Rincian Aset Lainnya Per Akun

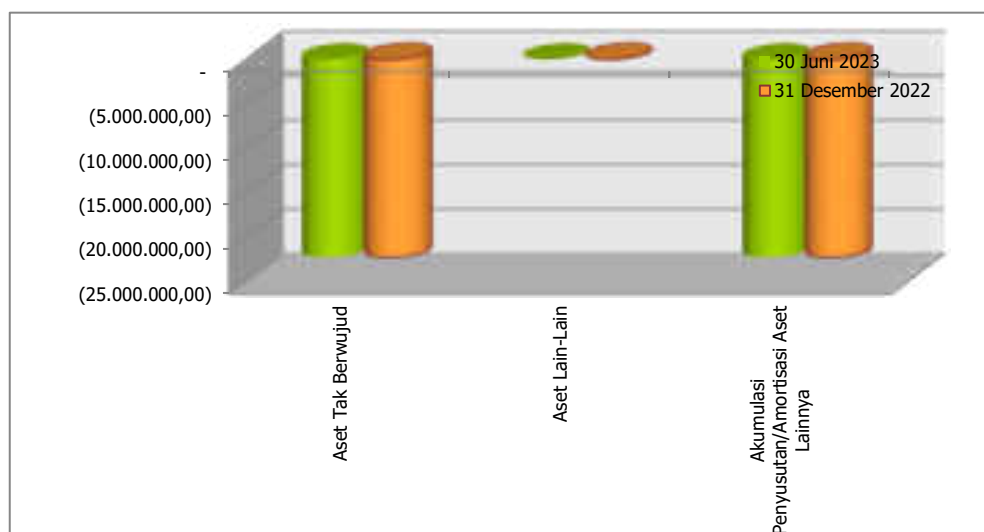
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	30-Jun-23	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Aset Tak Berwujud	22.200.000,00	22.200.000,00	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	22.200.000,00	22.200.000,00	-
3	Akumulasi Penyusutan/Amortasi Aset Lainnya	(22.200.000,00)	(22.200.000,00)	-
	Jumlah Aset Lainnya	-	-	-

Komposisi Aset Lainnya per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan dalam grafik dibawah ini :

Grafik

Komposisi Aset Lainnya



Aset Tak

Berwujud Rp 22.200.000,00

C.16 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa *software* komputer yang digunakan untuk menunjang operasional kantor dan lisensi.

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 22.200.000,00 dan Rp 22.200.000,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

Rincian Aset Tak Berwujud, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester I Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Lain-Lain **C.17 Aset Lain–Lain**
Rp 0,00 Aset Lain-Lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Aset Lain-lain per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

Rincian Aset Lain-lain, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku per Semester I Tahun 2023 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi **C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**
Penyusutan Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang
dan Amortisasi disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan
Aset Lainnya penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rp Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per Semester I Tahun 2023 dan 31
(22.200.000,0 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp (22.200.000,00) dan Rp
0) (22.200.000,00), terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Kewajiban **KEWAJIBAN**
Jangka Pendek **Kewajiban Jangka Pendek**

Rp Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera
320.219.148,0 diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
0 Neraca.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji sebesar Rp 320.219.148,00 dan Rp 19.986.012,00, terjadi Kenaikan sebesar Rp 300.233.136,00 atau 1,502.22 persen.

Perbandingan rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 per akun disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 15. Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per Akun

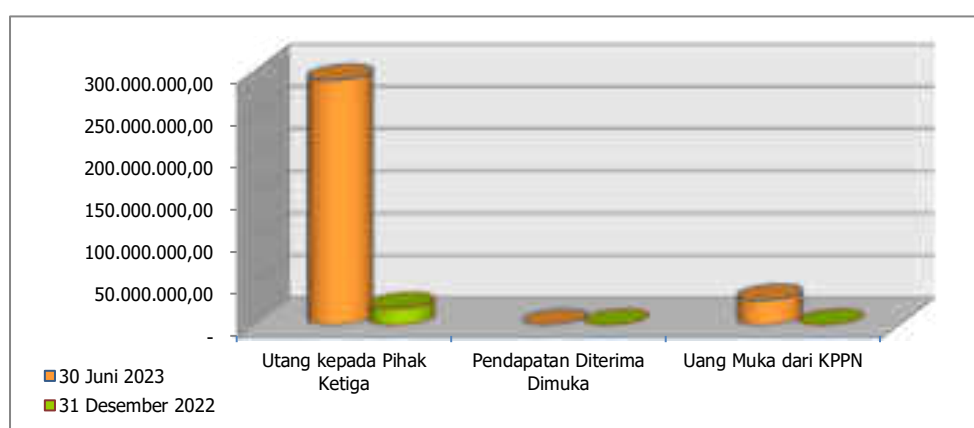
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	30-Jun-23	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan
1	Utang Kepada Pihak ketiga	290.219.148,00	19.986.012,00	270.233.136,00
2	Uang Muka dari KPPN	30.000.000,00	-	30.000.000,00
	Jumlah Kewajiban jangka Pendek	320.219.148,00	19.986.012,00	300.233.136,00

Komposisi Kewajiban Jangka Pendek per Semester I Tahun 2023 dan Tahunan 2022 disajikan dalam grafik dibawah ini :

Grafik

Komposisi Kewajiban Jangka Pendek



Uang Muka dari KPPN Rp 30.000.000,00

C.14 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 30.000.000,00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 30.000.000,00,- atau sebesar 1000 %, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp 5.307.528.804,00

EKUITAS

C.15 Ekuitas

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas per Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar adalah masing-masing sebesar Rp 5.307.528.804,00 dan Rp 5.608.952.543,00, terjadi Penurunan sebesar Rp 301.423.739,00 atau 5,37 persen.

*Pendapatan
PNBP Rp
519.472,00*

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 519.472,00 dan Rp 0,00, terjadi Kenaikan sebesar Rp 519.472,00.

*Beban Pegawai
Rp
2.101.931.385,
00*

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.101.931.385,00 dan Rp 2.044.710.463,00. Terjadi Kenaikan sebesar Rp 57.220.922,00 atau 2,798 persen dari tahun 2022.

*Beban
Persediaan Rp
24.213.644,00*

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 24.213.644,00 dan Rp 13.849.025,00 terjadi kenaikan sebesar Rp 10.364.619,00 atau 74,84 persen.

*Beban Barang
dan Jasa Rp
578.394.720,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 578.394.720,00 dan Rp 554.634.534,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp 23.760.186,00 atau sebesar 4,824 persen dari tahun 2022.

Beban Pemeliharaan Rp 205.842.283,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 205.842.283,00 dan Rp 232.198.200,00. Terjadi Penurunan sebesar Rp (26.355.917,00) atau sebesar (11,351 persen dari tahun 2022.

Beban Perjalanan Dinas Rp 27.852.500,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 27.852.500,00 dan Rp 24.850.000,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp 3.002.500,00 atau sebesar 12,082 persen dari tahun 2022.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 144.038.016,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 144.038.016,00 dan Rp 104.364.881,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp 39.673.135,00 atau sebesar 38,014 persen dari tahun 2022.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,00

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan Beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan Piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

Kegiatan Non Operasional Rp 0,00

D.9 Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<i>Ekuitas Awal</i>	E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
<i>Rp</i>	E.1 Ekuitas Awal
<i>5.608.952.543,00</i>	Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5.608.952.543,00 dan Rp 5.556.327,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp 52.625.160,00 atau sebesar 0,00 persen dari tahun 2022.
<i>Surplus/Defisit</i>	E.2 Surplus (Defisit) LO
<i>LO (Rp</i>	Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara Surplus/Defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Kejadian Luar Biasa.
<i>3.081.752.916,00)</i>	Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2023 dan 2020 adalah defisit sebesar (Rp 3.081.752.916,00) dan (Rp 2.974.607.103,00).
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</i>	E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
<i>Rp0,00</i>	Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2023 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i>	E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset
<i>Rp0,00</i>	Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
	Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i>	E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan
<i>Rp0,00</i>	Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
	Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0,00 **E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**
Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang Aset Tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp 0,00 **E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp 0,00 merupakan pengurangan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi.

Koreksi Lain-lain Rp 0,00 **E.3.6 Koreksi Lain-lain**
Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada Semester I Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Transaksi Antar Entitas Rp 2.780.329.177,00 **E.4 Transaksi Antar Entitas**
Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Nilai transaksi Antar Ekuitas untuk periode yang berakhir Semester I Tahun 2023 dan Tahunan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.780.329.177,00 dan Rp 2.419.593.078,00. Terjadi Kenaikan sebesar Rp 360.736.101,00 atau sebesar 0,00 persen dari tahun 2022.

Ekuitas Akhir Rp 5.307.528.804,00 **E.5 Ekuitas Akhir**
Nilai ekuitas pada tanggal Semester I Tahun 2023 dan Tahunan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 5.307.528.804,00 dan Rp 5.001.313.356,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp 306.215.448,00 atau sebesar 0,00 persen dari tahun 2022.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca per Semester I Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Pamekasan.

F.2 Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Sampai dengan Semester I Tahun 2023 tidak terdapat temuan BPK RI untuk ditindaklanjuti.

F.3 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor Pengadilan Agama Pamekasan sampai dengan per Semester I Tahun 2023 sebanyak 3 rekening dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 1. Rekening Bendahara Pengeluaran | : | 2 rekening |
| 2. Rekening Bendahara Penerimaan | : | 0 rekening |
| 3. Rekening Lainnya | : | <u>1 rekening</u> |
| Jumlah | : | 3 rekening |

F.4 Pengungkapan Penting Lain-lain

Tidak ada pengungkapan penting lain-lain.